

ABSTRAK

Setiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai (OSP). OSP memiliki peran penting untuk pengembangan program partai politik yang strategis yang tidak di laksanakan oleh partai politik. Adanya kemendesakkan untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara. Urgensi pengaturan OSP yaitu kepastian untuk memberikan perlindungan hukum dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Pengaturan selain itu diperlukan dalam konteks memperjelas hubungan hukum antara organisasi sayap partai dengan partai politik pembentuknya serta dilakukan dalam kerangka penguatan reformasi partai politik agar makin kuat, adaptif dan berkesinambungan. Nilai dan tujuan akhirnya dalam kerangka pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara agar makin demokratis, berkeadilan dan mensejahterakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi untuk membenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membentuk peraturan pelaksana Pasal 12 huruf J yaitu PP terkait OSP dan memasukan dalam RUU perubahan atas UU Partai Politik yang diatur dalam UU No, 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP.

Kata kunci: Pengaturan, Organisasi Sayap Partai, Partai Politik, Reformasi.

ABSTRACT

Every political party tries to maximize every component in the structure of their political party. One component that is in direct contact with the citizen is the wings of political parties, which is an important element in political parties to develop strategic political party programs that are indirectly not covered by political parties. There is an urgency to organize the wings of political parties as a form of the constitutional responsibility of the State for the right to associate and assemble of their own citizen; so that there is certainty to provide legal protection; and clarifying the socio-political status compared to other organizations. Regulations are needed in the context of clarifying the legal relationship between the wings of political parties and the political parties that forms them; carried out within the framework of strengthening political party reforms so that they become stronger, adaptive and continuous. The final values and objectives in the framework of achieving the life of the nation and state so that they become more democratic, fair and welfare. This research is a legal research that uses the statute approach, case approach and conceptual approach.

The results of the study show that there is an urgency to reform the model of constitutional legal regulations for WPP by establishing implementing regulations on Article 12 letter J, namely UU related to WPP and including in the bill amending the Law on Political Parties regulated in Law No, 2 of 2011 concerning Amendments to Laws Number 2 of 2008 concerning Political Parties by making a special chapter on WPP and recommendations for the content of the ideal regulations for WPP.

Keywords: *Arrangement, Wings of Political Parties, Political Parties, Reform.*